

**ANALISIS KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DUSUN BEJI, JETIS, BANTUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh :

Gokhan

NIM. 18102030011

Pembimbing:

Rahadiyand Aditya, MA

NIP 19930610 201903 1 009

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1333/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DUSUN BEJI, JETIS, BANTUL, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GOKHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18102030011
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Rahadiyand Aditya, M.A.
SIGNED
Valid ID: 6303546374966


Penguji II
Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 6303566616167


Penguji III
Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED
Valid ID: 630268909732




Yogyakarta, 16 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 630479676630e

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 5515856 Yogyakarta 55281

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Gokhan

NIM : 18102030011

Judul : Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Pembimbing :

Rahadiyand Aditya, MA
NIP. 19930610 201903 1 009

Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos.I. M.Si
NIP. 19830811 201101 2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gokhan
NIM : 18102030011
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang diplubikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRAHA
YOGYAKARTA



Gokhan

18102030011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *bil'alamiin*, puji syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala limpahan Rahmat, Taufiq, serta Karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad *Sholallahu'alaihiwasalam*, yang senantiasa memberikan petunjuk bagi umatnya. Penulis Bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua, Bapak Pirwam dan Ibu Surmawati yang memberikan segala dukungan baik itu finansial, moral, maupun kesempatan untuk memilih jalan saya sendiri. Terima kasih atas semua kasih sayang, didikan, dan juga nasehat-nasehat yang baik bagi saya. Semoga karya ini dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka dan semoga dapat menjadi langkah awal untuk dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada kedua orang tua saya.

Ucapan terima kasih juga untuk kakak dan adik-adik saya yang senantiasa menerima kehadiran diri ini di rumah tatkala penat dan jenuh di tempat rantauan.

Pengurus kelompok PKH Dusun Beji dan anggotanya yang telah memberikan izin serta dengan tangan terbuka turut membantu menyelesaikan penulisan ini. Khususnya Ibu Siti Latifah, Ibu Dewi Fatmawati, Ibu Wahyu

Mutiarani, dan Ibu Umi.

Persembahkan kepada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

“Positive Thinking to Create Positive Things”

“The only way to finish is start”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya, tugas akhir skripsi dalam rangka untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (satu) dengan judul “*Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta*” dapat disusun sesuai harapan.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas karena adanya bantuan kerja sama dengan pihak lain. Maka, perlu kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. HJ. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Aminah, S.Sos.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Dr. Aziz Muslim, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan.
5. Rahadiyand Aditya, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberi bimbingan dari awal skripsi hingga akhirnya dapat terselesaikan
6. Seluruh dosen Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bekal ilmu dan wawasannya.

7. Siti Latifah, Dewi Fatmawati, Wahyu Mutiarani, Umi, dan seluruh masyarakat Dusun Beji yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas dalam proses penelitian
8. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung setiap keputusan yang saya ambil serta selalu mendoakan
9. Semua teman PMI angkatan 18 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
10. Sahabat saya, Diqi dan Fisqi yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi baik.
11. Teman-teman Exact khususnya Baihaqi Aksa, Muchlas, Ardin, Dita, Mindah, dan Nisa.
12. Teman-teman Trenslish khususnya Darul, Mayang, dan Ayu
13. Rombongan Bastian, Sendika, dan Latif
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah banyak membantu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala amal kebaikan yang telah dilakukan. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain umumnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Gokhan
NIM 18102030011

ABSTAK

Gokhan. Nim. 18102030011. ANALISIS KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DUSUN BEJI, JETIS, BANTUL, YOGYAKARTA. Pembimbing Rahadiyand Aditya, M. A. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2022.

Angka kemiskinan di Indonesia selama masa Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan. Pada September 2019 (sebelum pandemi), angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% dan Pada September 2020 (setelah pandemi), angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 10,19%. Pelaksanaan PKH Dusun Beji selama pandemi Covid-19 mengalami beberapa kendala sehingga program peningkatan kemampuan keluarga tidak dapat dilaksanakan.

Tujuan Penelitian adalah mendeskripsikan implementasi program PKH Dusun Beji dan keberlanjutan PKH Dusun Beji pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data valid yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi PKH Dusun Beji terbagi dalam 3 kategori yakni Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Keluarga, P2K2 Bidang Kesehatan, dan P2K2 Bidang Lingkungan. Pasca pandemi covid-19, terdapat indikator keberlanjutan PKH Dusun Beji yaitu *Nature*, adanya kesadaran akan lingkungan dan kesehatan tetap ada melalui pelaksanaan agen kesehatan dan sedekah sampah. *Society*, Kepengurusan/Kelompok PKH dan Pertemuan Rutin Pasca Kembali. *Economy*, Adanya Kas Kelompok dan Adanya Dana Hasil dari Sedekah Sampah. *Well Being*, belum ada dalam implementasi.

Kata Kunci : PKH Dusun Beji, Implementasi, dan Keberlanjutan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Kajian Teori	12
1. Implementasi Kebijakan	12
2. Sustainability Compass (Kompas Keberlanjutan)	18
3. Pengembangan Masyarakat	22
H. Metode Penelitian	25
1. Lokasi penelitian.....	25
2. Jenis penelitian.....	25
3. Subjek penelitian dan Objek Penelitian	26
4. Teknik Penentuan Informan.....	26
5. Teknik pengumpulan data.....	27
6. Validitas data	29
7. Teknik Analisis Data	31
I. Sistematika Pembahasan	32

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DUSUN BEJI	34
A. Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji.....	34
B. Profil Peserta Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji.....	42
BAB III IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PKH DUSUN BEJI	48
A. Implementasi PKH Dusun Beji.....	48
1. Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Keluarga.....	50
2. Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Kesehatan.....	52
3. Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Lingkungan	60
4. Model Implementasi PKH Dusun Beji	64
B. Keberlanjutan PKH Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19.....	79
1. Kesadaran Lingkungan	80
2. Ekonomi.....	82
3. Kehidupan Sosial	84
4. Kesejahteraan anggota	86
C. Analisis Implementasi dan Keberlanjutan PKH Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19	90
1. Implementasi PKH Dusun Beji	90
2. Keberlanjutan PKH Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19	91
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100
1. Dokumentasi Selama Penelitian.....	100
2. Transkrip Wawancara.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Pendamping PKH Kapanewon Jetis	43
Tabel 2 Profil Peserta KPM PKH Dusun Beji	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Dusun Beji Sumber Data : Google Maps.....	34
Gambar 2 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	100
Gambar 3 Kelompok PKH Dusun Beji melakukan pilah sampah dalam Sedekah Sampah.....	100
Gambar 4 Kelompok PKH Dusun Beji mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin.....	101
Gambar 5 Ketua Pengurus Agen Kesehatan dan Sedekah Sampah PKH Dusun Beji.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta**”. Penegasan judul ditujukan untuk menghindari kekeliruan pemahaman terkait judul skripsi. Berikut ini beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi :

1. Analisis Keberlanjutan

Sustainability atau keberlanjutan merupakan kondisi akhir yang ideal untuk dicapai¹. Seperti halnya konsep demokrasi, konsep emansipasi, dan lain sebagainya, konsep keberlanjutan merupakan tujuan mulia yang dapat diekspresikan dalam berbagai cara dan realisasi serta perlu penyempurnaan dalam mendefinisikannya. Oleh karena itu, definisi tentang konsep keberlanjutan akan selalu berkembang sepanjang zaman². Namun setidaknya, definisi keberlanjutan akan selalu mencakup indikator alam, ekonomi, komunitas/institusi sosial, dan individu perorangan yang terintegrasi secara efektif dalam jangka panjang³.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Compton dan Mc Clesky (1980) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses dimana masyarakat secara bersama-sama mendefinisikan

¹ Alan Atkisson and R. Lee Hatcher, ‘The Compass Index Of Sustainability: Prototype For A Comprehensive Sustainability Information System’, *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 03.04 (2001), 509–32 <<https://doi.org/10.1142/S1464333201000820>>.

² Atkisson and Hatcher.

³ Atkisson and Hatcher.

masalah dan kebutuhannya, mencari solusi dari dalam diantara mereka sendiri, memobilisasi semua sumberdaya yang ada dan menyusun rancangan tindakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya. Sedangkan menurut H.M Ya'kub (1985) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dengan memihak kepada masyarakat rentan atau masyarakat lemah dalam rangka memfasilitasi mereka dalam sebuah proses penyadaran agar memungkinkan lahirnya upaya pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan yang ketiga, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi⁴.

3. Program Keluarga Harapan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), program adalah suatu rancangan yang akan dijalankan terkait asa serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya⁵. Program harus direncanakan dengan matang agar dapat mencapai hasil yang baik.

Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ikatan darah. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga merupakan unit

⁴Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁵Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>.

terkecil dalam masyarakat yang tinggal dalam sebuah rumah dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa program keluarga harapan merupakan perencanaan dalam mewujudkan keluarga mandiri dan sejahtera. PKH merupakan program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) guna memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM). Keluarga Miskin (KM) yang menerima bantuan PKH disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat⁶. Jumlah penduduk di Indonesia per Juni 2021 sebanyak 272 jiwa⁷. Namun sayangnya, 10,14% penduduk masih berada dibawah garis kemiskinan⁸. Tingginya angka kemiskinan mengakibatkan terjadinya kesengsaraan dan ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat⁹. Dampak lainnya dari kemiskinan adalah adanya anak-anak putus sekolah dan tindakan kriminalitas.

⁶Worldmeters, 'World Population', 2021 <<https://www.worldometers.info/world-population/>> [accessed 23 September 2021].

⁷Kemendagri, 'Peduduk Indonesia', <[https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit#:~:text=“Berdasarkan data Administrasi Kependudukan \(Adminduk, jiwa adalah perempuan” papar Zudan](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit#:~:text=“Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk, jiwa adalah perempuan” papar Zudan)> [accessed 23 September 2021].

⁸Badan Pusat Statistik (BPS), 'Persentase Penduduk Miskin', 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>> [accessed 23 September 2021].

⁹ Soerjono Soerkanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Kemiskinan memerlukan penanganan yang serius untuk menghindari adanya kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) di masa mendatang. Pemerintah berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan program yang tepat dari pemerintah untuk masyarakat. Salah satu program pemerintah yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, kondisi kemiskinan di Indonesia menjadi semakin parah karena adanya Pandemi Covid-19¹⁰. Pandemi Covid-19 yang bisa menyebabkan kematian, menjadikan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah penularan Covid-19 sehingga tatanan kebijakan, tatanan perekonomian, tatanan sosial dan semuanya berubah. Penerapan kebijakan pembatasan berskala mikro berdampak pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi di Indonesia, sehingga para pelaku ekonomi mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Angka kemiskinan di Indonesia selama masa Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan¹¹. Pada September 2019 (sebelum pandemi), angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22% dan Pada September 2020 (setelah pandemi), angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 10,19%¹². Namun, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 10,14% yang berarti terjadi penurunan angka

¹⁰ SMERU, 'Kemiskinan Selama Pandemi', 2021 <<https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>> [accessed 23 September 2021].

¹¹ SMERU.

¹² SMERU.

kemiskinan dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia pada September 2020¹³.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir (2017-2021)¹⁴. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 146,98 ribu jiwa. Wilayah Kabupaten Bantul memiliki luas 506.85 Ha²/sq.ha dengan kepadatan penduduk 1986 jiwa/km. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 985,77 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bantul sebesar 2,72 % yang artinya setiap 100 penduduk usia kerja terdapat 3 orang yang menjadi pengangguran.

Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) pasca pandemi Covid-19. PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Di beberapa negara lainnya, PKH disebut dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, terutama masalah kemiskinan kronis seperti di negara Brazil, Meksiko, Kolombia, dll¹⁵. PKH mendorong Keluarga Miskin (KM) untuk memiliki akses pelayanan sosial dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, pangan gizi, perawatan, pendampingan, dan termasuk berbagai perlindungan sosial lainnya yang termasuk

¹³ SMERU.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS).

¹⁵ Elvira Santi and Mbina Pinem, 'Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12.1 (2020), 75 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.15747>>.

program komplementer secara berkelanjutan¹⁶. Khusus untuk Kapanewon Jetis yang ada di Kabupaten Bantul, Program PKH memiliki program agen kesehatan dan sedekah sampah. Program tersebut diinisiasi oleh pendamping PKH sejak tahun 2016. Ketugasan pendamping PKH sebenarnya hanya pada pemberian FDS (*Family Development Session*) atau P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) berupa pemberian materi setiap bulannya dan memfasilitasi KPM yang mengalami kendala dalam pencairan dana bantuan PKH.

Pelaksanaan PKH selama pandemi Covid-19 mengalami beberapa kendala seperti kegiatan pendampingan diadakan secara online karena adanya kebijakan pembatasan berskala nasional. Program agen kesehatan dan sedekah sampah di Dusun Beji, Kapanewon Beji juga tidak dapat dilaksanakan. Kendala tersebut berlangsung sejak awal kondisi pandemi Covid-19 hingga kasus mulai melandai setelah adanya program vaksinasi. Pada Desember 2021, seiring dengan berjalannya program vaksinasi, kebijakan pembatasan mulai dikendurkan sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat sudah bisa dilakukan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana keberlanjutan atau keberlangsungan program inisiasi pendamping PKH yakni agen kesehatan dan bank sampah di Dusun Beji, Kapanewon jetis, Kabupaten Bantul. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2012, sangat disayangkan apabila program tersebut terhenti karena adanya pandemi Covid-19.

¹⁶ Kemensos, 'Program Keluarga Harapan', 2021 <<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>> [accessed 23 September 2021].

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi program PKH Dusun Beji?
2. Bagaimana keberlanjutan program PKH Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Implementasi program PKH Dusun Beji
2. Mendeskripsikan Keberlanjutan Program Keluarga Harapan di Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis dari penelitian ini mampu digunakan sebagai sumbangan keilmuan dalam bidang Analisis Keberlanjutan Program Keluarga Harapan Pasca Pandemi Covid-19
2. Manfaat secara Praktis dari penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai masukan atau solusi bagi lembaga, organisasi masyarakat, atau instansi yang membutuhkan dalam pengembangan Program Keluarga Harapan

F. Kajian Pustaka

Peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Berkaitan dengan fokus penelitian ini tentang analisis keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Beji, Jetis, Bantul, Yogyakarta.

Penelitian pertama adalah Penelitian Angling Agustin Pawiengla dkk. yang berjudul “Komparasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Tahun 2018 (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”¹⁷. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui komparasi pelaksanaan program PKH dan P2PK dalam mengurangi angka kemiskinan tahun 2018. Hasil penelitian tersebut ialah (1) Pelaksanaan PKH sudah cukup berjalan dengan baik dan cukup berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan yang mana program sosialisasi PKH dilaksanakan secara meneluruh dan rutin, serta pencairan dana PKH dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu, verifikasi data dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan objektif. (2) P2PK masih kurang berjalan dengan maksimal sehingga tidak terlalu berdampak pada penurunan kemiskinan dilihat dari program pemberdayaan lingkungan/infrastruktur (fisik) masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, pemberdayaan usaha (ekonomi) dan pemberdayaan manusia (sosial) yang dilaksanakan masih kurang efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel penelitian yakni PKH. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada komparasi PKH dan P2PK dalam mengurangi angka kemiskinan tahun 2018, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis keberlanjutan PKH.

¹⁷ Santi Mulyana, Eny Inti Suryani, and Goestyari Kurnia Amanta, ‘Komparasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Tahun 2018’, *DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 1.2 (2021).

Penelitian kedua adalah Penelitian Muhtadi dan Indah Choirunnisa yang berjudul “Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok”¹⁸. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penerima manfaat pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Beji Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang menggunakan indikator keandalan (*reability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphy*), dan berwujud (*tangible*) secara bersamaan memiliki korelasi signifikan antar variabel. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh memiliki pengaruh terhadap variabel kepuasan penerima bantuan sebesar 70,3 persen. Sedangkan sisa nilai sebesar 29,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan positif bagi pengelola PKH untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penerima bantuan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada salah satu variabel penelitian yakni PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut fokus menguji pengaruh kualitas pelayanan PKH terhadap penerima manfaat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada analisis keberlanjutan program PKH.

Penelitian ketiga adalah Penelitian Mohd Iqbal Abdul Muin dan Siti Abidah Lubis yang berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui

¹⁸ Muhtadi Muhtadi and Indah Choirunnisa, ‘Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan Terhadap Kepuasan Penerima Manfaat Di Kelurahan Beji Depok’, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3.2 (2019), 397–424 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-08>>.

Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”¹⁹. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PKH serta untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui PKH di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada peran dinsos dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis keberlanjutan program PKH.

Penelitian keempat, Penelitian yang dilakukan Zainur Wula tentang “Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Politik Keluarga Harapan (Studi Kasus di Ngalukoja Kabupaten Ende)”²⁰. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan politik keluarga harapan di Ngalukoja-Ende. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada keluarga penerima

¹⁹ Mohd Iqbal Abdul Muin and Siti Abidah Lubis, ‘Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi’, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8.1 (2020), 92–109.

²⁰ Zainur Wula, ‘Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Politik Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Ngalukoja Kabupaten Ende)’, *Jurnal Neo Societal*, 6.1 (2021), 12–21.

manfaat PKH di Desa Ngalukoja sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam implementasinya belum menemui sasaran karena data-data yang disampaikan tidak akurat tentang keluarga miskin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut pada variabel PKH. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi dan keberlanjutan PKH Dusun Beji, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada kebijakan pemerintah dalam PKH.

Penelitian kelima, Penelitian yang dilakukan Sari, Sulistyowati, dan Prihantika tentang “Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Dalam Perspektif *The Most Significant Change Technique*” (MSCT)²¹. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan analisis terhadap dampak Program Keluarga Harapan pada eks Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pagelaran menggunakan indikator perubahan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah teori evaluasi dampak dengan teknik *Most Significant Change* (MSC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran telah memberikan dampak perubahan pada eks Keluarga Penerima Manfaat baik yang bersifat positif maupun negatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel PKH. Perbedaannya terletak pada

²¹ Ainun Oktavia Sari, Rahayu Sulistyowati, and Ita Prihantika, ‘Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCT)’, *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2.3 (2020), 373–82 <<https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.51>>.

fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada implementasi dan keberlanjutan PKH Dusun Beji, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada dampak sosial ekonomi PKH.

Dari beberapa penelitian di atas, maka bisa dijadikan sumber rujukan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Dengan adanya perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian yang dilakukan peneliti layak untuk diteliti.

G. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kata Implementasi (*Implementation*) di dalam Cambridge *Dictionary* berarti sebuah tindakan yang bermula dari rencana atau sistem²². Nurdin Usman didalam buku “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” menjelaskan bahwa implementasi akan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, mekanisme atau sistem yang terencana untuk mencapai suatu tujuan²³. Purwanto dan Sulistyastuti juga menjelaskan bahwa implementasi adalah distribusi dari keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan²⁴. Menurut Merile S. Grindle, Terdapat dua variabel yang berkaitan dengan implementasi yakni

²²Cambridge University, ‘Cambridge Dictionary’, 2022
<<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>>.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

²⁴ Purwanto and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)²⁵.

Kebijakan merupakan rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dilakukan²⁶. Adanya implementasi kebijakan dapat memunculkan sebuah program. Menurut Jones, program merupakan salah satu komponen dalam sebuah kebijakan²⁷. Implementasi kebijakan yang menghasilkan program tidaklah sesederhana keliatannya. Korten menjelaskan bahwa setidaknya diperlukan 3 elemen yaitu kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan yang menghasilkan program ditentukan oleh kesesuaian antara tiga unsur tersebut. Pertama, kesesuaian antara program dengan kelompok penerima manfaat dimana program yang dirancang sebisa mungkin memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan pelaksana program dimana program yang dirancang sesuai dengan kemampuan pelaksana program. Ketiga, pelaksana program dan kelompok sasaran dimana kelompok sasaran wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pelaksana.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan sebuah program diperlukan implementasi kebijakan. Untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan maka diperlukan kesesuaian anatara kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan, dan

²⁵ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

²⁶ Kemendikbud.

²⁷ Dodi Ardi Kurniadi, 'Pelaksanaan Program Evaluasi Diri Sekolah (Eds) Di SMP Negeri 2 Tempel' (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) <<https://eprints.uny.ac.id/9705/>>.

kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk membuat atau mengubah sebuah program maka sangat berkaitan dengan implementasi kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Edward III, Van Mater, Grindle dan Mazmanian dan Sabatier. Edward III menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel dalam mengimplementasikan kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi²⁸. Keempat variabel tersebut saling mempengaruhi sekaligus saling bergantung satu sama lain dalam terhadap implementasi. Dengan kata lain, keempat variabel tersebut menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.

1) Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses menyampaikan informasi tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran. Kemudian, dengan adanya komunikasi, para pelaku kebijakan diharapkan dapat mempersiapkan dengan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan dapat dicapai.

²⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Siduarjo: Bayumedia, 2006).

2) Sumber Daya

Adanya sumber daya yang memadai diperlukan dalam implementasi kebijakan, apabila tidak ada sumber daya yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, faktor sumber daya juga akan berpengaruh pada pelaksanaan program. Adapun faktor sumber daya yang berpengaruh pada implementasi kebijakan diantaranya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan²⁹. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam sumber daya diantaranya³⁰ :

- a) Staf : staf merupakan sumber daya utama di dalam implementasi kebijakan. Adanya kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh jumlah staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya. Oleh karenanya, pemenuhan jumlah staf implementor saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan kecukupan staf yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang sesuai dengan isi kebijakan.
- b) Informasi : informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk, yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

²⁹ Cut Razi Mirsandi, 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

³⁰ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pertama Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang : Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompok tertentu.
- d) Fasilitas : Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Oleh karenanya, fasilitas fisik diperlukan dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi (Sikap)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut Goerge

C. Edward III, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi diantaranya adalah³¹ :

- a) Pengangkatan birokrat : Disposisi atau sikap pelaksana tugas dapat memunculkan hambatan-hambatan pada implementasi kebijakan ketika pelaksana tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, adanya pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi.
- b) Insentif : Edward mengatakan bahwa salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meminimalisir masalah yang disebabkan oleh para pelaksana adalah dengan memberi mereka insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan diri mereka sendiri, maka memanipulasi insentif dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu yang paling penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu

³¹ Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

kebijakan, akan terdapat kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif, maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik³².

2. Sustainability Compass (Kompas Keberlanjutan)

Sustainability atau keberlanjutan merupakan kondisi akhir yang ideal untuk dicapai³³. Seperti halnya konsep demokrasi, konsep emansipasi, dan lain sebagainya, konsep keberlanjutan merupakan tujuan mulia yang dapat diekspresikan dalam berbagai cara dan realisasi serta perlu penyempurnaan dalam mendefinisikannya. Oleh karena itu, definisi tentang konsep keberlanjutan akan selalu berkembang sepanjang zaman³⁴. Namun setidaknya, definisi keberlanjutan akan selalu mencakup indikator alam, ekonomi, komunitas/institusi sosial, dan individu perorangan yang terintegrasi secara efektif dalam jangka panjang³⁵. Oleh karena itu, setiap kerangka kerja, program, kebijakan harus fleksibel dan dapat beradaptasi mengikuti definis yang berubah-ubah.

³² Tabrani Rusyan, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

³³ Atkisson and Hatcher.

³⁴ Atkisson and Hatcher.

³⁵ Atkisson and Hatcher.

Salah satu pisau analisis yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan program adalah *sustainability compass*³⁶. Atkisson adalah tokoh dibalik pencetusan konsep ini. Atkisson terinspirasi untuk membuat konsep ini setelah melihat sebuah kompas mata angin. Secara definitif, *sustainability compass* adalah alat analisis untuk meninjau dan memahami keberlanjutan sebuah program dan juga untuk membantu mengawasi proses berjalannya sebuah program. Atkisson mengganti kata yang digunakan dari *north* menjadi *nature*, *east* menjadi *economy*, *south* menjadi *society*, dan *west* menjadi *wellbeing*. Analisis *sustainability compass* dibagi menjadi empat bagian, yaitu *nature*, *economy*, *society*, dan *well-being*³⁷. Keempat ini diperoleh berdasarkan laporan evaluasi program. *Sustainability compass* mengintegrasikan antara alat komunikasi yang *simple* dan efektif dengan pendekatan yang lebih *up to date* terhadap ilmu pengukuran keberlanjutan, sehingga mampu menghasilkan jalan atau alternatif solusi agar dapat menuju ke tujuan keberlanjutan program dan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan³⁸.

a. *Nature* (Alam)

Nature diartikan sebagai alam dan seluruh komponen di dalamnya. *Nature* berkaitan erat dengan sistem ekologi, sumber daya alam, dan tingkat keanekaragaman hayati, *Nature* merupakan kunci dari keseimbangan ekosistem,

³⁶ alan Atkisson And R. Lee Hatcher, 'The Compass Index Of Sustainability: Prototype For A Comprehensive Sustainability Information System', *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 03.04 (2001), 509–32 <<https://doi.org/10.1142/S1464333201000820>>.

³⁷ Atkisson and Hatcher.

³⁸ Karl-Hennk Robèrt and others, 'A Compass for Sustainable Development', *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 4.2 (1997), 79–92 <<https://doi.org/10.1080/13504509709469945>>.

kualitas lingkungan siklus alam, dan sumber kesehatan bagi manusia. Sederhananya, indikator pada *nature* diantaranya lingkungan, ekosistem, sumber daya, dan iklim.

b. *Economy* (Ekonomi)

Economy diartikan sebagai proses produksi segala sumber daya menjadi barang atau jasa. *Economy* membahas tentang produktivitas dan efisiensi manusia dalam segala sektor seperti pertanian, manufaktur, lapangan pekerjaan, stabilitas mata uang, dll. Dimensi lain yang dibahas dalam *economy* yakni upah, pasar, energi, konsumsi, penelitian dan pengembangan, pendapatan, distribusi, dll. Sederhananya, indikator dalam *economy* diantaranya produksi, konsumsi, pekerjaan, investasi, uang.

c. *Society* (Masyarakat)

Society diartikan sebagai institusi kolektif yang dibentuk oleh manusia. *Society* erat kaitannya dengan peradaban manusia. *Society* meliputi sektor pemerintahan, swasta, komunitas masyarakat, hingga keluarga. *Society* merupakan gabungan antara sistem nilai dan norma yang menghasilkan warisan budaya, kohesi antar kelompok, tata kelola dan kebijakan, dll. Indikator dalam *society* diantaranya pemerintah, institusi, budaya, dan masalah sosial.

d. *Well-being* (Kesejahteraan)

Well-being diartikan sebagai proses akhir yang hendak dicapai manusia seperti kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, dan pemenuhan kebutuhan individu manusia. Apabila *society* identik dengan kolektif atau kebutuhan bersama maka

well-being berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individual baik secara fisik maupun secara emosional dan spiritual. Indikator dalam *well-being* diantaranya kesejahteraan hidup, kesehatan keluarga, dan upaya pengembangan kualitas diri.

Model *sustainability compass* seringkali disalahpahami sebagai pilihan arah mana yang harus dituju untuk mencapai keberlanjutan. Misalnya saja, ketika kita menuju *west (well-being)* kita akan meninggalkan *east (economy)* serta komponen *north* dan *south* yang berbeda arah. Padahal seharusnya model *sustainability compass* ini dilihat sebagai satu kesatuan utuh untuk mencapai keberlanjutan. Analogi sederhananya, jika tidak ada *north (Nature)*, maka akan sulit untuk menemukan *south (Society)*, begitupun dengan *east (economy)* dan *west (well-being)* ³⁹. Oleh karenanya, secara teori untuk dapat mewujudkan sebuah program keberlanjutan, diperlukan 4 komponen dalam *sustainability compass* yakni *Nature*, *Economy*, *Society*, dan *Well Being*. Dengan adanya kompas tersebut, diharapkan setiap program yang ada dapat mencapai keseimbangan alam, ekonomi, institusi sosial, dan individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, *sustainability compass* dapat juga digunakan untuk :

- 1) Menjelaskan keberlanjutan dalam bahasa yang lebih mudah dicerna dan sederhana.
- 2) Menjelaskan keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan, secara keseluruhan sistem.

³⁹ Dana Kapitulčinová and others, 'Towards Integrated Sustainability in Higher Education – Mapping the Use of the Accelerator Toolset in All Dimensions of University Practice', *Journal of Cleaner Production*, 172 (2018), 4367–82 <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.050>>.

- 3) Menyediakan simbol pemersatu untuk; program; pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan.
- 4) Mempertemukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mengelola keterlibatan mereka dalam inisiatif keberlanjutan.
- 5) Mengembangkan indikator dan laporan keberlanjutan untuk organisasi, perusahaan, kota, dll.
- 6) Melakukan penilaian keberlanjutan dan analisis kesenjangan untuk perusahaan.

3. Pengembangan Masyarakat

a. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Compton dan Mc Clesky (1980) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses dimana masyarakat secara bersama-sama mendefinisikan masalah dan kebutuhannya, mencari solusi dari dalam diantara mereka sendiri, memobilisasi semua sumberdaya yang ada dan menyusun rancangan tindakan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya. Sedangkan menurut H.M Ya'kub (1985) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*). Proses ini mencakup tiga aktivitas penting yaitu pertama, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dengan memihak kepada masyarakat rentan atau masyarakat lemah dalam rangka memfasilitasi mereka dalam sebuah proses penyadaran agar memungkinkan lahirnya upaya pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Ketiga,

menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi ⁴⁰. Menurut Wuradji (1999) pengembangan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan dan cita-cita⁴¹.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk membantu masyarakat agar pembangunan dapat dilakukan dengan prakarsa sendiri melalui identifikasi kebutuhan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Pertama, memperlakukan masyarakat sebagai subyek bukan obyek (yang menerima apa adanya) dalam proses pembangunan. Peran pengembang dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Kedua, pengembangan masyarakat harus mampu menciptakan masyarakat mandiri yang tidak selalu menunggu uluran dari pihak lain untuk mengembangkan atau membangun wilayahnya. Untuk itu proses yang diperlukan dalam membentuk kemandirian adalah “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Ketiga adalah kesejahteraan hidup sebagai tujuan akhir pengembangan masyarakat. Membangun kehidupan sejahtera yang dapat dinikmati oleh semua orang dan membangun kebaikan dalam kehidupan di

⁴⁰ Muslim.

⁴¹ Muslim.

antara sesama manusia hanya dapat dilakukan apabila ada kerjasama diantara manusia dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan hidup maka perlu dikembangkan dari masyarakat pasif menjadi masyarakat dinamis, dari masyarakat yang semula pasrah pada nasib menjadi masyarakat yang ingin maju, dan dari masyarakat ketergantungan menjadi masyarakat mandiri.

b. **Kebutuhan Akan Pengembangan Masyarakat**

Kebutuhan akan pengembangan masyarakat salah satunya dapat kita cermati dari pendapat Paulo Freire yang mengatakan bahwa alasan mengapa masyarakat buta dengan kebutuhannya sendiri adalah karena sistem dibuat tidak menguntungkan. Karenanya untuk membuat orang tidak buta dengan kebutuhannya diperlukan pemberdayaan. Freire kemudian menawarkan proses pemberdayaan yakni melalui pembebasan dan penyadaran.

Untuk mewujudkan pembebasan, bagi Freire, pemberdayaan harus bisa berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pemberdayaan harus bisa membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungannya dan turun tangan untuk menyelesaikannya. Bukan pemberdayaan yang menjadikan akal manusia patuh kepada keputusan-keputusan orang lain. Oleh karena diperlukan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yakni : guru (pembuat kebijakan), murid (kelompok sasaran), dan realitas dunia.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jetis, Desa Sumber Agung, Dusun Beji tepatnya di lokasi binaan PKH Dusun Beji. Pemilihan lokasi ini dikarenakan disana terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) beserta ekstra servis yang berikan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria program PKH. Selain program utama PKH yang memberikan bantuan langsung tunai bersyarat, terdapat juga ekstra servis yang hanya terdapat di Kecamatan Jetis yakni Shodaqoh Sampah dan Agen Kesehatan. Adanya ekstra servis tersebut merupakan inisiatif dari pengurus PKH sejak tahun 2016 dan berlangsung hingga sekarang.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penyajian data penelitian secara deskriptif. Menurut Jane Richie, metode kualitatif deskriptif digunakan dalam upaya menyuguhkan dunia sosial dan perspektif dari segi pendapat, perilaku, tanggapan, dan persoalan tentang manusia⁴². Peneliti memilih metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan Implementasi PKH Dusun Beji dan Keberlanjutan PKH Dusun Beji agar dapat menyajikan data yang lengkap.

⁴² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 6

3. Subjek penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran penelitian baik berupa tempat, benda, maupun personal ataupun kelompok yang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Pendamping PKH Kecamatan Jetis, Pendamping PKH Dusun Beji, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Dusun Beji. Objek penelitian adalah Implementasi PKH Dusun Beji dan Keberlanjutan PKH Dusun Beji Pasca Pandemi Covid-19

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan berdasarkan kriteria. Penentuan kriteria didasarkan pada masing-masing subjek penelitian. Adapun kriteria yang tersebut sebagai berikut :

a. Dinas Sosial Kabupaten Bantul

- 1) Sebagai koordinator kabupaten dalam mengkoordinir Program Keluarga Harapan

b. Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Jetis

- 1) Pendamping PKH Kecamatan Jetis yang mengkoordinir kegiatan PKH di tingkat Kecamatan

c. Pendamping PKH Dusun Beji

- 1) Pendamping PKH Dusun Beji yang mendampingi KPM di tingkat dusun

d. Keluarga Penerima Manfaat PKH Dusun Beji

- 1) Masyarakat Dusun Beji yang memenuhi syarat menerima bantuan PKH
- e. Masyarakat Dusun Beji yang terlibat aktif dalam kegiatan ekstra servis yang diberikan pendamping

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Rincian penggunaan teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

- a. Observasi : Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dikarenakan penulis tidak terlibat langsung dalam pengembangan maupun kegiatan dalam program keluarga harapan. Melalui observasi, penulis akan mendapatkan data dengan cara mengamati dan mencatat objek dalam fenomena yang diteliti tanpa menggunakan pertanyaan atau komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik non partisipan dimana penulis berada di luar subjek penelitian. Data yang diperoleh dengan observasi merupakan tahap pengamatan dan pencatatan objek melalui fenomena yang diteliti tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa keadaan dan keaktifan orang-orang yang terlibat ketika adanya pertemuan Pendamping PKH dan Para KPM PKH.

b. Wawancara : Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian dikarenakan penulis ingin menggali lebih dalam informasi dari informan secara lengkap dan sesuai fakta yang ada di lapangan. Metode wawancara (interview) merupakan proses untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya-jawab antara pewawancara dengan responden. Dalam wawancara, penulis akan menemui langsung informan dan mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang mana pertanyaannya tidak akan dibatasi dan informan dapat bebas merespon tanpa ada batasan tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan irama yang lebih bebas dan lebih mengalir selama wawancara.

Data wawancara akan disimpan dalam bentuk rekaman suara dan catatan dari penulis. Dengan demikian, penulis akan mendapatkan data yang bersifat primer karena didapatkan langsung di lapangan.

Penulis melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan PKH Dusun Jetis, seperti Rini dan Sulis sebagai Koordinator PKH Kabupaten Bantul, Wahyu sebagai Pendamping PKH Dusun Beji, Dewi selaku Ketua Kelompok KPM PKH, Siti Latifah selaku Mantan Ketua Kelompok KPM PKH dan Koordinator Sedekah Sampah KPM PKH, Serta Umi selaku Mantan

Koordinator PKH Kapanewon Jetis dan Inisiator Pemberdayaan KPM PKH.

- c. Studi Dokumentasi : Penulis melakukan teknik studi dokumentasi dengan cara melacak arsip-arsip terkait PKH. Selain itu, penulis juga mencari referensi melalui jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu untuk dapat memberikan gambaran detail terkait rekomendasi apa yang diperlukan untuk mengembangkan PKH.

6. Validitas data

Dalam mengukur keabsahan data, terdapat beberapa teknik pemeriksaan tertentu yang termasuk ke dalam kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Beberapa teknik tersebut diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau kejegan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus⁴³. Penulis menggunakan teknik validitas data triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pemeriksaan melalui sumber lainnya merupakan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Menurut Denzin yang dikutip oleh Moloeng, terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

⁴³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, menulis menggunakan triangulasi sumber dan metode :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses membandingkan derajat kepercayaan dari satu sumber terhadap sumber lainnya. Data yang telah dibandingkan akan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dimintakan kesepakatan. Dalam penelitian ini penulis membandingkan data wawancara Ketua kelompok KPM PKH tahun 2022 dengan Koordinator PKH Kapanewon Jetis tahun 2022 atau Koordinator PKH Kapanewon Jetis 2022 dengan Mantan Koordinator PKH Kapanewon Jetis.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah proses mencari keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.

Tujuan dari triangulasi metode adalah mendapatkan data yang sama setelah mencek dan ricek teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data interaktif dengan cara :

a. Mengumpulkan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi catatan penelitian. Penulis kemudian membagi catatan penelitian menjadi dua, yakni catatan deskripsi dan catatan refleksi. Catatan deskripsi merupakan catatan langsung yang diperoleh dari informan tanpa ada tambahan apapun dari penulis, sedangkan catatan refleksi merupakan catatan pribadi penulis berupa penafsiran selama mengumpulkan data.

b. Mereduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dipilah kembali agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Data yang sesuai dengan fokus penelitian dikategorikan sebagai data penting, sedangkan data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian dikategorikan sebagai data yang tidak penting.

c. Menyajikan data

Data yang sudah direduksi kemudian disusun secara sistematis agar dapat memperoleh penjelasan yang dapat dipahami. Penyusunan data disesuaikan dengan fokus penelitian agar memungkinkan untuk

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan. Dalam penyajian data, penulis menggunakan teks naratif.

d. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam teknis analisis data. Data yang sudah disajikan kemudian dicari kembali pola hubungan sebab akibat sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Untuk dapat menarik kesimpulan, penulis perlu memahami kembali hasil penelitian yang sudah dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang menerangkan apa saja yang akan dijelaskan setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut beberapa uraian sistematika pembahasan:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dituliskan gambaran umum PKH Dusun Beji, Kapanewon Jetis, Bantul, Yogyakarta.

BAB III, pada pembahasan ini berisi tentang temuan lapangan berupa hasil wawancara dan data-data lain. Bentuk dari tulisan ini yaitu narasi dan ditulis setelah data observasi dan wawancara sudah

diklarifikasikan terlebih dahulu. Kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan.

BAB IV, penutup berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan dan hasil pembahasan yang berdasarkan pada data lapangan, sehingga pokok permasalahan pada rumusan masalah dapat diuraikan dalam pembahasan pada BAB sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Implementasi Program PKH Dusun Beji berjalan dengan baik. Meskipun terdapat kendala karena adanya pandemi Covid-19, program PKH Dusun Beji sudah dimulai kembali sejak November 2021. Implementasi Program PKH Dusun Beji terdiri dari P2K2 di bidang keluarga, P2K2 di bidang kesehatan, dan P2K2 di bidang lingkungan. Keberhasilan Implementasi Program PKH Dusun Beji dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pendamping PKH, dan Kelompok PKH. Pada akhirnya, implementasi Program PKH Dusun Beji mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan Implementasi PKH Dusun Beji berdampak pada keberlanjutan program pasca pandemi covid-19. Keberlanjutan PKH Dusun Beji sesuai dengan teori sustainability compass dari Atkisson dimana pemberdayaan masyarakat akan mengarah pada *nature, economy, society, dan well-being*. *Nature*, adanya kesadaran akan lingkungan dan kesehatan tetap ada melalui pelaksanaan agen kesehatan dan sedekah sampah. *Society*, Kepengurusan/Kelompok PKH dan

Pertemuan Rutin Pasca Kembali. *Economy*, Adanya Kas Kelompok dan Adanya Dana Hasil dari Sedekah Sampah. *Well Being*, belum ada dalam implementasi. Meskipun demikian, *well-being* yang merupakan akhir yang diharapkan dimana individu peserta KPM PKH Dusun Beji dapat mencapai kemandirian.

Proses pemberdayaan mengarah pada kesadaran masyarakat. Implementasi PKH Dusun Beji berhasil menyadarkan masyarakat seberapa pentingnya pengetahuan keluarga, kesehatan, dan lingkungan. Melalui pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit tidak menular dan program sedekah sampah untuk menampung sampah rumah tangga, KPM PKH Dusun Beji menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan hal-hal yang dekat dan dirasakan sehari-hari. Adanya kesadaran tersebut menjadikan pemberdayaan PKH Dusun Beji dapat berkelanjutan meskipun sempat berhenti ketika ada Pandemi Covid-19.

B. Saran

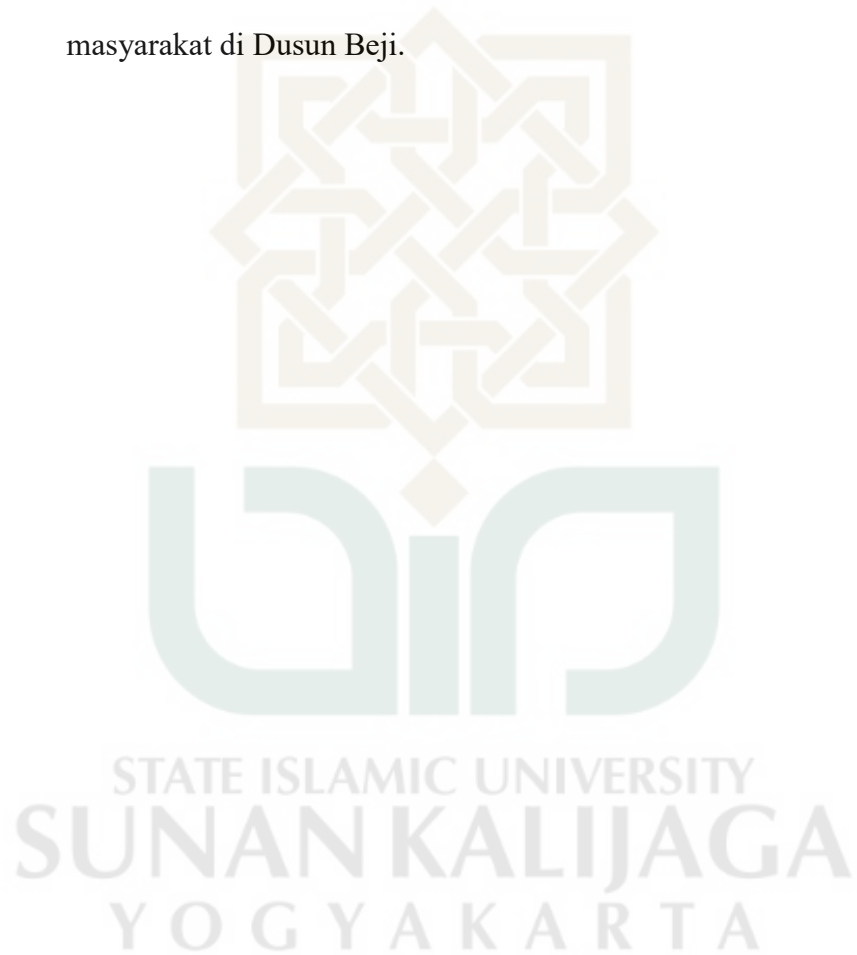
Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis merumuskan beberapa saran untuk keberlanjutan Program PKH Dusun Beji :

1. Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam Program PKH Dusun Beji menjadikan proses pemberdayaan masyarakat terbatas pada inisiasi dari pendamping PKH. Oleh karenanya diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kembali Program PKH dan mempertegas pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Desain program PKH selama ini membebaskan pendamping untuk berkreasi sendiri dalam memberikan

pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, kreasi tersebut selama ini belum ditampung dan dipilah pemberdayaan yang berpotensi berkelanjutan.

2. Eksistensi pemberdayaan masyarakat melalui PKH Dusun Beji saat ini sepenuhnya dilaksanakan pendamping PKH dan KPM PKH Dusun. Keterlibatan Pemerintah Desa Sumber Agung baru sebatas support moriil. Oleh karenanya saran kepada Pemerintah Desa Sumber Agung untuk dapat melihat potensi pengembangan pemberdayaan di Dusun Beji. Proses pemberdayaan di Dusun Beji selama ini baru berjalan bagi peserta KPM PKH, sehingga perlu diperluas jangkauannya dengan melibatkan masyarakat tingkat dusun dan tingkat desa.
3. Inisiasi dan pergerakan sudah dimulai oleh pendamping PKH Dusun Beji dengan sangat baik. Namun, meski demikian tidak pendamping PKH tidak bisa hanya mengandalkan KPM PKH dalam proses keberlanjutannya. Saran kepada Pendamping PKH Dusun Beji untuk lebih memperhatikan dan memfasilitasi program pemberdayaan di bidang kesehatan dan lingkungan lebih lanjut. Program pemberdayaan bisa dikatakan sudah mencapai level kesadaran masyarakat Dusun Beji untuk bergerak atas prakarsa kelompok mereka sendiri, namun usaha tersebut harus terus difasilitasi agar terus berlanjutan. Selain itu, pendamping perlu membantu proses evaluasi pengembangan program pemberdayaan di Dusun Beji, sehingga dapat tercipta pemberdayaan masyarakat dalam format yang berbeda.

4. Dalam penelitian ini, penulis baru menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Saran kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Beji secara kuantitatif. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui seberapa besar angka keberlanjutan pemberdayaan masyarakat di Dusun Beji.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Atkisson, Alan, and R. Lee Hatcher, 'The Compass Index Of Sustainability: Prototype For A Comprehensive Sustainability Information System', *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 03.04 (2001), 509–32 <<https://doi.org/10.1142/S1464333201000820>>
- Badan Pusat Statistik (BPS), 'Persentase Penduduk Miskin', 2021 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>> [accessed 23 September 2021]
- Cambridge University, 'Cambridge Dictionary', 2022 <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>>
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Kapitulčinová, Dana, Alan AtKisson, Joanne Perdue, and Markus Will, 'Towards Integrated Sustainability in Higher Education – Mapping the Use of the Accelerator Toolset in All Dimensions of University Practice', *Journal of Cleaner Production*, 172 (2018), 4367–82 <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.050>>
- Kemendagri, 'Peduduk Indonesia', 2021 <[https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit#:~:text=“Berdasarkan data Administrasi Kependudukan \(Adminduk, jiwa adalah perempuan” papar Zudan](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit#:~:text=“Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk, jiwa adalah perempuan” papar Zudan)> [accessed 23 September 2021]
- Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>
- Kemensos, 'Program Keluarga Harapan', 2021 <<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>> [accessed 23 September 2021]
- Kurniadi, Dodi Ardi, 'Pelaksanaan Program Evaluasi Diri Sekolah (Eds) Di SMP Negeri 2 Tempel' (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) <<https://eprints.uny.ac.id/9705/>>
- Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)
- Mirsandi, Cut Razi, 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

- Darussalam-Banda Aceh, 2019)
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989)
- Muhtadi, Muhtadi, and Indah Choirunnisa, 'Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan Terhadap Kepuasan Penerima Manfaat Di Kelurahan Beji Depok', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3.2 (2019), 397–424
<<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-08>>
- Muin, Mohd Iqbal Abdul, and Siti Abidah Lubis, 'PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8.1 (2020), 92–109
- Mulyana, Santi, Eny Inti Suryani, and Goestyari Kurnia Amanta, 'KOMPARASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2018', *DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 1.2 (2021)
- Muslim, Azis, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Purwanto, and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Robèrt, Karl-Hennk, Herman Daly, Paul Hawken, and John Holmberg, 'A Compass for Sustainable Development', *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 4.2 (1997), 79–92
<<https://doi.org/10.1080/13504509709469945>>
- Rusyan, Tabrani, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Santi, Elvira, and Mbina Pinem, 'Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12.1 (2020), 75 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.15747>>
- Sari, Ainun Oktavia, Rahayu Sulistyowati, and Ita Prihantika, 'Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt)', *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2.3 (2020), 373–82 <<https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.51>>
- SMERU, 'Kemiskinan Selama Pandemi', 2021

<<https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>>
[accessed 23 September 2021]

Soerkanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002)

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Siduarjo: Bayumedia, 2006)

Worldmeters, 'World Poplotion', 2021 <<https://www.worldometers.info/world-population/>> [accessed 23 September 2021]

Wula, Zainur, 'Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Politik Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Ngalukoja Kabupaten Ende)', *Jurnal Neo Societal*, 6.1 (2021), 12–21

